



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang : 2021 – 2022  
Masa Sidang : IV  
Rapat : Ke – 18  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 10.25 WIB s.d 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara  
DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat  
masing-masing.  
Acara : 1. Membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak  
(PNBP) Sektor Perhubungan Darat.  
2. dan lain-lain.  
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos.,M.Si  
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH  
Hadir Anggota : ..... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara  
Fisik dan Virtual  
Hadir Mitra : Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan  
beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat pada hari ini adalah membahas mengenai PNBP Sektor Perhubungan Darat.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap semua Jenis Jasa Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor Perhubungan Darat.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengelolaan PNBP sektor Perhubungan Darat dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan kendaraan *Over Dimension* dan *Over Load* (ODOL).
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menuntaskan digitalisasi dalam pelayanan agar tercapai sistem perijinan yang lebih cepat, efektif, dan transparan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 13 April 2022

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



BUDI SETIYADI

KETUA RAPAT,



LASARUS